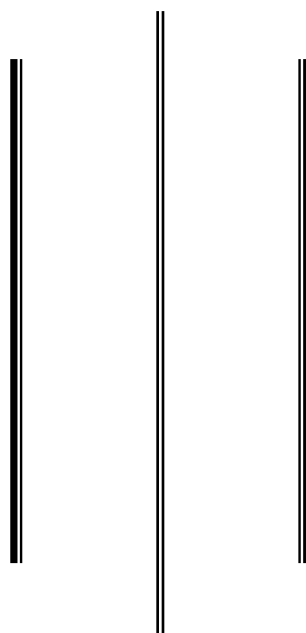




**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**



**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2012**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012 dapat diselesaikan.

Keberhasilan penyusunan LAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan serta partisipasi semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Dengan telah selesainya penyusunan LAKIP ini, kami berharap mudah-mudahan LAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam peningkatan kinerja pelaksanaan tugas yang lebih baik dimasa datang untuk mencapai tujuan yang kita inginkan.

Kami menyadari bahwa LAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 ini masih banyak kekurangan, untuk itu diharapkan sekali adanya masukan, saran, dan kritik dari semua pihak demi lebih sempurnanya laporan ini.

Purbalingga, Januari 2013

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. NUR HAMAM, M. Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19620614 198503 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Kantor Kesbangpol tahun 2012 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai tujuan yang telah ditetapkan, kendala-kendala dan upaya mengatasi kendala tersebut.

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga, yaitu:

1. Mengupayakan peningkatan peran dan fungsi Ormas, Orpol, LSM, dan elemen masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan kemantapan wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila, ketahanan bangsa, pembauran, dan kesadaran bela Negara.
2. Mengupayakan peningkatan peran dan fungsi partai politik untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis.

B. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai Kantor Kesbangpol melalui 4 program dan 17 kegiatan, yaitu:

1. Terdukungnya ATK, listrik, kebutuhan air minum dan telepon.
2. Tercukupinya berbagai perjalanan dinas.
3. Terpeliharanya sarana dan prasarana Kantor.
4. Terwujudnya peningkatan SDM PNS.
5. Terwujudnya peningkatan keamanan di hari raya lebaran, natal, tahun baru dan tamu VIP.
6. Terdeteksi dan teratasinya ATHG yang ada di Kabupaten Purbalingga.
7. Teratasinya berbagai gangguan keamanan melalui koordinasi yang lebih efektif antar "muspida".
8. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi Parpol, dan peningkatan aktifitas Parpol.
9. Teratasinya permasalahan pendirian rumah ibadah, dan terlaksananya program FKUB.
10. Terfasilitasinya Ormas, LSM, dan terwujudnya aspirasi masyarakat.
11. Terfasilitasinya kegiatan Orpol dan tersusunnya dokumen peta partai politik.
12. Terwujudnya peningkatan persatuan dan kesatuan antar etnis di Kabupaten Purbalingga.
13. Terwujudnya peningkatan wawasan kebangsaan bagi peserta pembekalan wasbang.
14. Terwujudnya peningkatan kualitas/ kuantitas sarana, prasarana kantor.

15. Terdukungnya kegiatan Ormas, LNL, yang difasilitasi.
16. Terwujudnya peningkatan keamanan melalui pembinaan Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM).
17. Terwujudnya peningkatan wawasan kebangsaan bagi peserta Forkom.

C. Kendala-kendala

Permasalahan yang ada pada Satker kami, antara lain:

1. Terbatasnya personil.
2. Terbatasnya anggaran.
3. SDM/ kualitas personil terbatas.
4. Sarana dan prasarana Kantor (kendaraan dinas roda 2).

D. Cara Mengatasi

Dari permasalahan tersebut di atas, maka upaya mengatasinya, yaitu:

1. Mengoptimalkan personil yang ada dengan kerja lembur.
2. Efisiensi dana/ anggaran.
3. Mengupayakan mengikuti Diklat.
4. Mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana secara efektif.

E. Capaian Kinerja

Secara keseluruhan pada Satker kami terdapat 4 (empat) program, yaitu:

1. Program penguatan kelembagaan daerah.
2. Program peningkatan perlindungan masyarakat.
3. Program fasilitasi dan pembinaan kehidupan sosial politik.
4. Program wawasan kebangsaan.

F. Kegiatan

Pada Satker kami terdapat 17 (tujuh belas) kegiatan yaitu:

Program Penguatan Kelambagaan Daerah

1. Kegiatan penyediaan bahan dan jasa perkantoran.
 - Target Rp 121. 060. 000
 - Realisasi Rp 112. 978. 409
2. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
 - Target Rp 73. 172. 000
 - Realisasi Rp 71. 360. 800
3. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - Target Rp 94. 046. 000
 - Realisasi Rp 90. 428. 400

4. Kegiatan sarana dan prasarana kantor
 - Target Rp 58. 698. 000
 - Realisasi Rp 58. 383. 000
5. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai.
 - Target Rp 12. 600. 000
 - Realisasi Rp 5. 910. 000

Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat

1. Kegiatan pemberdayaan badan koordinasi dan informasi.
 - Target Rp 27. 000. 000
 - Realisasi Rp 26. 550.000
2. Kegiatan Pam Tup lebaran, natal, tahun baru, dan tamu VIP.
 - Target Rp 13.902. 000
 - Realisasi Rp 13. 872. 000
3. Kegiatan keamanan terpadu
 - Target Rp 353. 000. 000
 - Realisasi Rp 352. 997. 500

Program Fasilitasi dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik

1. Kegiatan forum komunikasi umat beragama (FKUB).
 - Target Rp 49. 830. 000
 - Realisasi Rp 49. 100. 012
2. Kegiatan fasilitasi kegiatan Ormas, LSM, dan pemantauan aspirasi masyarakat.
 - Target Rp 30. 000. 000
 - Realisasi Rp 25. 310. 000
3. Kegiatan fasilitasi kegiatan Orpol dan penyusunan data serta peta partai politik.
 - Target Rp 4. 998. 000
 - Realisasi Rp 4. 997. 000
4. Kegiatan pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik dan fasilitasi kegiatan partai politik.
 - Target Rp 12. 703. 000
 - Realisasi Rp 5. 538. 000
5. Kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM).
 - Target Rp 7. 500. 000
 - Realisasi Rp 7. 471. 000
6. Fasilitasi program kerjasama Pemda dengan Ormas, LSM, dan Lembaga Nirlaba lainnya.
 - Target Rp 57. 094. 000
 - Realisasi Rp 55. 768. 500

Program Wawasan Kebangsaan

1. Kegiatan sarasehan pembauran etnis.
 - Target Rp 4. 000. 000
 - Realisasi Rp 3. 575. 000
2. Kegiatan forum komunikasi kesatuan bangsa.
 - Target Rp 14. 745. 000
 - Realisasi Rp 14. 598. 000
3. Pembekalan wawasan kebangsaan
 - Target Rp 75. 600. 000
 - Realisasi Rp 73. 824. 500

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai Inpres RI Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana dimaklumi bahwa keberadaan Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga dinilai cukup strategis, karena mempunyai kewenangan dalam pembinaan politik, kemasyarakatan dan kesatuan bangsa.

Oleh karena itu, pada era otonomi daerah saat ini Kantor Kesbangpol relatif cukup berperan dalam rangka mendukung keutuhan NKRI.

Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga dibentuk berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (di dalamnya mengatur Kantor Kesbangpol).
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesbangpol.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yaitu sebagai sarana untuk memberikan gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbangpol Tahun 2012 sesuai amanah Perda Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga.

Adapun tujuannya antara lain sebagai sarana evaluasi kinerja/pelaksanaan tugas dalam kurun waktu yang bersangkutan, sebagai sarana pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan keuangan kepada Bupati melalui Sekda.

D. Gambaran Umum SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah BAB VIII mengatur tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbangpol.

a. Kedudukan

Kantor Kesbangpol merupakan unsur pendukung pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pembinaan kesatuan bangsa, dan politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

b. Tugas Pokok

Kantor Kesbangpol mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, kemasyarakatan, dan politik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kantor Kesbangpol sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 mempunyai fungsi :

1. Penetapan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, dan politik;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan dibidang kesatuan bangsa, dan politik;

3. Pelaksanaan perumusan kebijakan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pelaksanaan penguatan nilai-nilai kebangsaan;
5. Fasilitasi dan pengelolaan dinamika politik, ekonomi dan sosial budaya;
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
7. Mengadakan fasilitasi dan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dari Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010, kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

d. Kondisi Pegawai

Jumlah pegawai yang ada pada Kantor Kesbangpol sejumlah 20 orang. Adapun rincian menurut golongan :

1. Golongan I = ----
2. Golongan II = 10 orang
3. Golongan III = 9 orang
4. Golongan IV = 1 orang

20 orang

Rincian menurut pendidikan :

1. S2 = 1 orang
2. S1 = ---
3. D3 = 3 orang
4. SLTA = 15 orang
5. SLTP = 1 orang

Kondisi sarana dan prasarana :

- Gedung kantor = 1 buah
- Kendaraan roda 4 (empat) = 1 buah
- Kendaraan roda 2 (dua) = 12 buah
- Komputer = 5 unit
- Meja = 30 buah
- Kursi = 31 buah
- Dsb.

E. Permasalahan Utama

Permasalahan yang ada pada satker kami, yaitu :

1. Terbatasnya personil
2. Terbatasnya anggaran
3. SDM/kualitas personil terbatas
4. Sarana dan prasarana kantor terbatas

Cara mengatasi :

1. Mengoptimalkan personil yang ada dan kerja lembur.
1. Efisiensi dana/anggaran.
2. Mengupayakan untuk mengikuti diklat.
3. Mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana secara efektif.

F. Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan (Penyusunan Lakip)
- D. Gambaran Umum SKPD
- E. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi
- F. Sistematika Penulisan

BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

- A. Perencanaan strategis (renstra skpd)
 - 1) Visi
 - 2) Misi
 - 3) Tujuan
 - 4) Sasaran
 - 5) Kebijakan Program dan Kegiatan
- B. Penetapan kinerja
 - Sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan kegiatan serta anggaran.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja
- B. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan/Aspek Keuangan

BAB IV. PENUTUP

- A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan
- B. Permasalahan yang Dihadapi
- C. Strategi Pemecahan Masalah

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dalam rangka mewujudkan/mendukung situasi yang kondusif sebagai syarat menunjang jalannya roda pemerintahan dan proses pembangunan maka Kantor Kesbangpol menetapkan :

1. Visi

Terwujudnya kondisi politik yang lebih demokratis, kondisi masyarakat yang aman dan damai dalam rangka mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi

- a) Terwujudnya kemantapan wawasan kebangsaan, ideologi, ketahanan bangsa, pembauran dan kesadaran bela negara.
- b) Mewujudkan sistim politik yang demokratis dan situasi kondusif.

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga, yaitu :

- a) Mengupayakan peningkatan peran dan fungsi Ormas, Orpol, LSM, dan elemen masyarakat yang lain melalui berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan kemantapan wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila, ketahanan bangsa, pembauran dan kesadaran bela negara.
- b) Mengupayakan peningkatan peran dan fungsi Partai Politik untuk mewujudkan sistim politik yang demokratis dan situasi kondusif.

4. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai yaitu:

- a) Terdukungnya ATK, listrik, kebutuhan air minum dan telepon.
- b) Tercukupinya berbagai perjalanan dinas.
- c) Terpeliharanya sarana dan prasarana Kantor.
- d) Terwujudnya peningkatan SDM PNS.
- e) Terwujudnya peningkatan keamanan di hari raya lebaran, natal, tahun baru dan tamu VIP
- f) Terdeteksi dan terlayannya ATHG yang ada di Kabupaten Purbalingga.
- g) Teratasinya berbagai gangguan keamanan melalui koordinasi yang lebih efektif antar "muspida".
- h) Terwujudnya peningkatan tertib administrasi Parpol, dan peningkatan aktifitas Parpol.
- i) Teratasinya permasalahan pendirian rumah ibadah, dan terlaksananya program FKUB.

- j) Terfasilitasinya Ormas, LSM, dan terwujudnya aspirasi masyarakat.
 - k) Terfasilitasinya kegiatan Orpol dan tersusunnya dokumen peta partai politik.
 - l) Terwujudnya peningkatan persatuan dan kesatuan antar etnis di Kabupaten Purbalingga.
 - m) Terwujudnya peningkatan keamanan melalui pembinaan Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM).
 - n) Terwujudnya peningkatan wawasan kebangsaan bagi peserta Forkom.
 - o) Terwujudnya peningkatan wawasan kebangsaan bagi peserta pembekalan wasbang.
 - p) Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana kantor.
 - q) Terdukungnya kegiatan Ormas, LNL, yang difasilitasi.
5. Kebijakan Program dan Kegiatan

Melalui program dan kegiatan, sebagai berikut :

Program

Pada tahun 2012 program yang dilaksanakan pada Kantor Kesbangpol, yaitu :

- a) Program Penguatan Kelembagaan Daerah
- b) Program Fasilitasi dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik
- c) Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat
- d) Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan

Dari 4 (empat) program tersebut diatas kemudian dijabarkan dalam :

- a) Program Penguatan Kelembagaan Daerah, terdiri dari :
 - 1. Kegiatan penyediaan bahan dan jasa perkantoran
 - 2. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
 - 3. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana
 - 4. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
 - 5. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai
- b) Program Fasilitasi dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik, terdiri dari :
 - 1. Kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)
 - 2. Kegiatan fasilitasi kegiatan Ormas, LSM, dan pemantauan aspirasi masyarakat
 - 3. Kegiatan fasilitasi kegiatan Orpol dan penyusunan data serta peta Partai Politik
 - 4. Kegiatan pengelolaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dan fasilitasi kegiatan Partai Politik
 - 5. Fórum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)
 - 6. Fasilitasi program kerjasama Pemda dengan Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya

- c) Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Kegiatan Pemberdayaan Badan Koordinasi dan Informasi
 - 2. Kegiatan Pam Tup Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Tamu VIP
 - 3. Kegiatan keamanan terpadu
- d) Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari :
 - 1. Kegiatan sarasehan pembauran etnis
 - 2. Kegiatan Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa
 - 3. Kegiatan pembekalan wawasan kebangsaan

B. Penetapan Kinerja

Pada tahun 2012 Kantor Kesbangpol melaksanakan 4 program dan 17 kegiatan. Adapun selengkapnya, sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan Daerah terdiri dari 5 kegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan penyediaan bahan dan jasa perkantoran, satu paket, dengan sasaran terdukungnya kebutuhan administrasi kantor, dengan alokasi anggaran Rp 121. 060. 000,-.
 - b. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, satu paket, dengan sasaran tercukupinya berbagai perjalanan dinas (dalam/luar) daerah pada Kantor Kesbangpol, alokasi dana Rp 73. 172. 000,-.
 - c. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana, satu paket, dengan sasaran terpeliharanya gedung, kendaraan dan peralatan kantor, alokasi dana Rp 94. 046. 000,-.
 - d. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai untuk 10 orang PNS, dengan sasaran terwujudnya peningkatan SDM PNS, alokasi dana Rp 12. 600. 000,-.
 - e. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor, dengan sasaran terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dengan alokasi dana sebesar Rp 58. 698. 000,-.
2. Program Fasilitasi dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik, terdiri dari 6 kegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), peserta pembinaan 350 orang, dengan sasaran terakomodasinya penyelesaian sengketa pendirian rumah Ibadah dan terwujudnya program kerja FKUB, alokasi dana Rp 49. 830. 000,-.
 - b. Kegiatan fasilitasi kegiatan Ormas, LSM, dan pemantauan aspirasi masyarakat, peserta pembinaan 75 orang dengan sasaran terdukungnya kegiatan Ormas/LSM serta terserapnya aspirasi masyarakat, dengan alokasi dana Rp 30. 000. 000,-.

- c. Kegiatan fasilitasi kegiatan Orpol dan penyusunan data serta peta Partai Politik, dengan peserta pembinaan sebanyak 75 orang, dengan sasaran terdukungnya kegiatan Parpol, alokasi dana Rp 4. 998. 000,-.
 - d. Kegiatan pengelolaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dan fasilitasi kegiatan Partai Politik, dengan 9 Parpol yang difasilitasi, dengan sasaran terdukungnya kegiatan Parpol, dan terciptanya tertib administrasi keuangan, alokasi dana Rp 12. 703. 000,-
 - e. Fórum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dengan peserta pembinaan Sebanyak 50 orang Dengan sasaran terwujudnya peningkatan keamanan melalui pembinaan Forum Kewaspadaan Masyarakat (FKDM), alokasi dana Rp 7. 500. 000,-
 - f. Fasilitasi program kerjasama Pemda dengan Ormas, LSM, dan Lembaga Nirlaba lainnya berupa kerjasama dengan 13 Ormas, LSM, dan LNL, dengan sasaran terdukungnya kegiatan Ormas, LNL, yang difasilitasi, alokasi dana Rp 57. 094. 000,-
3. Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 3 kegiatan, yaitu :
- a. Kegiatan Pam Tup Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Tamu VIP, diperuntukkan untuk 15 orang petugas Pam, dengan sasaran peningkatan kualitas keamanan dengan alokasi dana Rp 13.902.000,-.
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Badan Koordinasi dan Informasi, dana kegiatan diperuntukkan untuk biaya operasional 22 orang Kominda, dengan sasaran teratasinya ancaman, tantangan, hambatan, gangguan melalui upaya deteksi dini dan cegah dini dengan memanfaatkan informasi yang akurat, alokasi dana Rp 27. 000. 000,-.
 - c. Kegiatan keamanan terpadu, dana kegiatan diperuntukkan kepada 6 (enam) Forum Pimpinan Daerah (Muspida), dengan sasaran teratasinya berbagai gangguan keamanan di Kabupaten Purbalingga melalui peningkatan koordinasi antar Muspida, alokasi dana Rp 353. 000. 000,-.
4. Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan terdiri atas 3 kegiatan, yaitu :
- a. Kegiatan sarasehan pembauran etnis, dengan peserta sarasehan 75 orang, dengan sasaran terwujudnya peningkatan persatuan dan kesatuan antar etnis di Purbalingga, dengan alokasi dana Rp 4.000.000,-.
 - b. Kegiatan Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa, dengan peserta Forkom 210 orang, dengan sasaran terwujudnya peningkatan persatuan dan kesatuan antara Toga, Toma dan Perangkat, dengan alokasi dana Rp 14.745.000,-.
 - c. Kegiatan pembekalan wawasan kebangsaan, dengan peserta 900 orang, dengan sasaran terwujudnya peningkatan wawasan kebangsaan bagi peserta pembekalan, alokasi dana Rp 75. 600. 000,

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 (Perubahan)
KANTOR KESBANGPOL KAB. PURBALINGGA

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
1. Terdukungnya kebutuhan administrasi Kantor	1 Paket	100 % 1 Paket	A. Program Penguatan Kelembagaan Daerah 1. Kegiatan penyediaan bahan dan jasa perkantoran	Rp 121. 060. 000
2. Tercukupinya berbagai perjalanan dinas (dalam/ luar) daerah	1 Paket	100 % 1 Paket	2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.	Rp 73. 172. 000
3. Terpeliharanya gedung dan peralatan kantor	1 Paket	100 % 1 Paket	3. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana.	Rp 94. 046. 000
4. Terwujudnya peningkatan SDM PNS	10 orang	100 %	4. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai.	Rp 12. 600. 000
5. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	- Komputer Samsung - Komputer Toshiba - Printer - Modem - Handy Cam - Kamera Digital - Alat Sandi Jam Kacamata Balpoint Benik	2 buah 2 buah 1 buah 2 buah 2 buah 1 buah 2 buah 2 buah 2 buah 2 buah	5. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor.	Rp 58. 698. 000
			B. Program Fasilitasi dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik	

1. Terakomodasinya penyelesaian sengketa pendirian rumah ibadah dan terwujudnya program kerja FKUB	350 orang	100 % 350 orang	1. Forum komunikasi umat beragama (FKUB).	Rp 49. 830. 000
2. Terdukungnya kegiatan Ormas, serta tercapainya aspirasi masyarakat	75 orang	100 %	2. Kegiatan fasilitasi kegiatan Ormas, LSM, dan pemantauan aspirasi masyarakat.	Rp 30. 000. 000
3. Terdukungnya kegiatan Parpol yang ada di Kab. Purbalingga	75 orang	100 % 75 orang	3. Kegiatan fasilitasi kegiatan Orpol dan penyusunan data serta peta partai politik.	Rp 4. 998. 000
4. Terdukungnya kegiatan Parpol dan tercapainya tertib Adm. Keuangan Parpol	9 Parpol	100 % 9 Parpol	4. Kegiatan pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik dan fasilitasi partai politik.	Rp 12. 703. 000
5. Terwujudnya peningkatan pengetahuan tentang ancaman dan gangguan bagi peserta pembinaan sarasehan FKDM.	50 orang	50 orang	5. Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).	Rp 7. 500. 000
6. Terdukungnya Ormas, LSM, dan LNL, yang difasilitasi	13 organisasi	13 organisasi	6. Kegiatan fasilitasi program kerjasama Pemda dengan Ormas, LSM, dan LNL.	Rp 57. 094. 000

			C. Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	
1. Terwujudnya peningkatan kualitas keamanan	15 orang	100 %	1. Kegiatan Pam Tup lebaran, natal, tahun baru, dan tamu VIP.	Rp 13. 902. 000
2. Teratasinya ATHG melalui upaya deteksi dini, cegah dini dengan memanfaatkan informasi yang akurat.	22 orang	100 % 22 orang	2. Kegiatan pemberdayaan badan koordinasi dan informasi.	Rp 27. 000. 000
3. Teratasinya berbagai gangguan kewanaman di Kab. Purbalingga melalui peningkatan koordinasi antar "muspida"plus	6 orang "muspida"	100 % 6 orang "muspida"	3. Kegiatan kewanaman terpadu.	Rp 353. 000. 000

			D. Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan	
1. Terwujudnya peningkatan persatuan dan kesatuan antar Etnis di Purbalingga	75 orang	100 % 75 orang	1. Kegiatan sarasehan pembauran etnis	Rp 4.000.000
2. Terwujudnya peningkatan persatuan dan kesatuan antar Toga, Toma dan perangkat	210 orang	100 % 210 orang	2. Kegiatan forum komunikasi kesatuan bangsa	Rp 14.745.000
3. Terwujudnya peningkatan wawasan kebangsaan bagi peserta pembekalan	900 orang	900 orang	3. Kegiatan pembekalan wawasan kebangsaan	Rp 75. 600. 000
Jumlah Total				Rp 1. 009. 948. 000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sebagaimana telah dijelaskan di depan bahwa pada tahun 2012 Kantor Kesbangpol mendapatkan alokasi 4 (empat) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan. Adapun kinerja Kantor Kesbangpol tahun 2012 sebagaimana terurai dalam penetapan kinerja (perubahan) sebagai berikut :

1. Terdukungnya administrasi kantor.

Sasaran ini dapat dicapai antara lain karena tersedia anggaran yang cukup, efisiensi para aparat/PNS dalam pelaksanaan tugas.

2. Tercukupinya berbagai perjalanan dinas (dalam/luar) daerah.

Sasaran ini dapat dicapai antara lain karena berbagai rapat khususnya yang berlokasi diluar daerah mengutamakan prinsip efisiensi (menyesuaikan kebutuhan/kepentingan), serta petunjuk/kebijakan dari atasan/Bupati/Sekda.

3. Terpeliharanya gedung dan peralatan kantor.

Sasaran ini dapat dicapai antara lain karena alokasi anggaran yang relatif cukup, memakai prinsip efisiensi, dan peralatan yang ada relative terbatas/sedikit.

4. Terwujudnya peningkatan SDM PNS.

Sasaran ini dapat dicapai antara lain melalui diklat bagi PNS. Meskipun pada tahun 2012 hanya memberangkatkan 1 (satu) orang PNS, karena kegiatan diklat menyesuaikan permintaan/kebijakan, dan kebutuhan (belum optimal).

5. Terakomodasinya penyelesaian sengketa pendirian rumah ibadah dan terwujudnya program kerja FKUB.

Sasaran ini dapat dicapai karena pada kurun waktu tahun 2012 tidak terjadi (tidak ada) sengketa pendirian rumah ibadah. Dengan demikian situasi sangat kondusif. Program kerja FKUB yang berupa pembinaan (sambung rasa) bagi 350 orang dapat dilaksanakan dengan baik.

6. Terdukungnya kegiatan Ormas, serta terserapnya aspirasi masyarakat.

Sasaran ini dapat dicapai antara lain karena ormas yang ada di Kabupaten Purbalingga terfasilitasi, terdokumentasi dengan baik, serta aspirasi/keinginannya dapat terserap.

7. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor.

Sasaran ini dapat dicapai antara lain karena pendekatan yang relatif baik dengan aparat perencana dan penyedia dana. Selain itu penambahan sarana berupa: Komputer, Printer, Modem, beberapa alat Sandi., memang betul-betul mendukung pelaksanaan tugas dan sangat dibutuhkan.

8. Terdukungnya kegiatan Parpol yang ada di Kabupaten Purbalingga.
Sasaran ini dapat dicapai antara lain karena pengurus Parpol menerima fasilitasi/pembinaan administrasi agar tertib administrasi keuangan dapat terwujud (mendukung proses bantuan Parpol) yang ada terdokumentasi dengan baik. Adanya hubungan/komunikasi yang baik antara Parpol dengan aparat (Kantor Kesbangpol) sehingga mendukung pelaksanaan tugas.
9. Terdukungnya kegiatan Parpol dan terciptanya tertib administrasi keuangan Parpol.
Sasaran ini dapat dicapai melalui kegiatan pengelolaan bantuan keuangan kepada Parpol dan fasilitasi Parpol. Kegiatan berdampak tertib administrasi Parpol meningkat (proses pencairan dan Spj) sehingga Parpol dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena adanya dukungan/bantuan dana.
10. Terwujudnya peningkatan kualitas keamanan, khususnya peningkatan kualitas keamanan di hari Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Tamu VIP.
Sasaran ini dapat dicapai antara lain karena :
 - a. Koordinasi dengan aparat Pam terbuka dan Pam Tup (Kominda) berjalan baik.
 - b. Fungsi deteksi dini dan cegah dini berjalan baik sehingga gejala gangguan keamanan dapat diantisipasi dengan baik.
11. Teratasinya ATHG melalui upaya deteksi dini dan cegah dini dengan memanfaatkan informasi yang akurat.
Sasaran ini dapat dicapai antara lain karena :
 - a. Koordinasi antara anggota Kominda dalam fungsi Pam Tup berjalan efektif.
 - b. Bahan informasi yang akurat sangat bermanfaat bagi Forum Pimpinan Daerah dalam upaya mengatasi ATHG, khususnya gangguan keamanan.
12. Teratasinya berbagai gangguan keamanan di Kabupaten Purbalingga.
Sasaran ini dapat dicapai antara lain karena :
 - a. Kinerja “Muspida” meningkat karena adanya dukungan dana.
 - b. Kewenangan yang ada pada “Muspida” berdampak pada kinerja aparat dibawahnya (aparat Pam Tup dan Pam terbuka).
13. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan tentang hakekat ancaman dan gangguan, serta wawasan kebangsaan bagi peserta pembinaan/sarasehan FKDM.
Sasaran ini dapat dicapai antara lain karena :
 - a. Adanya komunikasi yang baik antara anggota dan pengurus FKDM dengan Pemda (Kantor Kesbangpol).
 - b. Adanya dukungan dana dari Pemda Purbalingga.
 - c. Adanya dedikasi yang cukup baik dari peserta yang hadir.
 - d. Setiap gangguan keamanan bisa diantisipasi dengan baik.

14. Terdukungnya Ormas, LSM, dan LNL yang difasilitasi. Sasaran ini dapat dicapai meskipun tidak maksimal, antara lain karena:
- Dukungan dana yang relatif dapat membantu kinerja Ormas, LNL, dari Pemda.
 - Tanggapan yang positif dari Ormas dan LNL.
15. Terwujudnya peningkatan wawasan kebangsaan, bagi peserta pembekalan sasaran ini dapat dicapai antara lain, karena:
- Dukungan dana dari Pemda yang relatif cukup sehingga mendukung kegiatan.
 - Materi pembinaan berupa Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan cukup relevan pada saat ini.
16. Terwujudnya peningkatan persatuan dan kesatuan antar etnis di Purbalingga. Sasaran ini dapat dicapai antara lain karena :
- Etnis yang ada di Kabupaten Purbalingga (Cina, Arab, Minangkabau, Madura, dsb) bersedia mengikuti program pemerintah.
 - Sarasehan pembauran etnis, dapat meningkatkan wawasan kebangsaan sehingga mampu meningkatkan persatuan dan kesatuan antar etnis.
17. Terwujudnya peningkatan persatuan dan kesatuan antara Toga, Toma dan Perangkat. Sasaran ini dapat dicapai antara lain karena :
- Kegiatan Forkomkesbang mampu meningkatkan wawasan kebangsaan sehingga mampu/berdampak meningkatkan persatuan dan kesatuan.
 - Materi Forkom yang berupa bela negara, Pancasila, dan juga rasa cinta tanah air, mampu meningkatkan persatuan dan kesatuan.

Adapun pencapaian sasaran ini, sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1. Terdukungnya kebutuhan administrasi kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
2. Tercukupinya berbagai perjalanan dinas (dalam/luar) daerah	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
3. Terpeliharanya gedung dan peralatan kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
4. Terwujudnya peningkatan SDM PNS	Peserta diklat	10 orang	1 orang	10%

5. Terakomodasinya penyelesaian sengketa pendirian rumah ibadah dan terwujudnya program kerja FKUB	Jumlah peserta pembinaan	350 orang	350 orang	100%
6. Terdukungnya kegiatan Ormas/LSM serta terserapnya aspirasi masyarakat	Jumlah peserta pembinaan	75 orang	75 orang	100%
7. Terdukungnya kegiatan Parpol yang ada di Kabupaten Purbalingga	Jumlah pengurus Parpol yang dibina	75 orang	75 orang	100%
8. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana Kantor	Jumlah komoditi barang yang dibeli	<ul style="list-style-type: none"> a. Komputer b. Komputer TPC Samsung Intel core 13 (2 buah) c. Komputer/ note book Toshiba Intel core (2 buah) d. Printer multi fungsi (1 buah) e. Modem USB (2 buah) f. Handy Cam (1 buah) g. Camera Digital (1 buah) h. Alat sandi <ul style="list-style-type: none"> - Jam (2 buah) - Kaca mata (2 buah) - Bolpoint (2 buah) - Benik (2 buah) 	<ul style="list-style-type: none"> 2 unit 2 buah 1 buah 2 buah 2 buah 1 buah 2 buah 2 buah 2 buah 2 buah 	100 %

1	2	3	4	5
9. Terdukungnya kegiatan Parpol dan terciptanya tertib administrasi	Jumlah Parpol yg difasilitasi	9 Parpol	9 Parpol	100%
10. Terwujudnya peningkatan kualitas keamanan	Jumlah aparat Pam Tup	15 orang	15 orang	100%
11. Teratasinya ATHG melalui upaya deteksi dini, cegah dini dengan memanfaatkan informasi yang akurat	Jumlah anggota dan sekretariat Kominda	22 orang	22 orang	100%
12. Teratasinya berbagai gangguan keamanan di Kabupaten Purbalingga melalui peningkatan koordinasi antar Muspida Plus	Jumlah institusi yang dibantu/ Difasilitasi	6 Institusi Muspida	6 Institusi Muspida	100%
13. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan tentang hakekat ancaman dan gangguan serta wawasan kebangsaan bagi peserta pembinaan sarasehan FKDM	Jumlah peserta pembinaan (FKDM)	50 orang	50 orang	100%
14. Terwujudnya peningkatan persatuan dan kesatuan antar etnis di Purbalingga	Jumlah peserta sarasehan	75 orang	75 orang	100%
15. Terwujudnya peningkatan persatuan dan kesatuan antar Toga, Toma dan Perangkat	Jumlah peserta Forkom	210 orang	210 orang	100%
16. Terwujudnya peningkatan wawasan kebangsaan bagi peserta pembekalan wasbang	Jumlah peserta pembekalan wasbang	900 orang	900 orang	100 %
17. Terdukungnya Ormas, LSM, dan LNL, yang difasilitasi	Jumlah Ormas, LSM, LNL, yang difasilitasi	13 organisasi	13 organisasi	100 %
Jumlah Total				98,80%

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil-hasil pengukuran kinerja kegiatan yang secara umum dapat dikatakan bahwa semua kegiatan pada Kantor Kesbangpol tahun 2011 dilihat indikator output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat), dan impact (dampak) menunjukkan pencapaian kinerja mencapai 100%.

Adapun indikator input (masukan) yang berupa dana dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Program Penguatan Kelembagaan Daerah

Rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyediaan bahan dan jasa perkantoran (93, 32 %).
- b. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (97, 52 %).
- c. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana (96, 15 %).
- d. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai (46, 90 %).
- e. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana (99, 46 %)

2. Program Fasilitas dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik.

Rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan forum komunikasi umat beragama (FKUB) → (98, 54 %).
- b. Kegiatan fasilitasi kegiatan Ormas, LSM, dan pemantauan aspirasi masyarakat (84, 36 %).
- c. Kegiatan fasilitasi kegiatan Orpol dan penyusunan data serta peta partai politik (99, 98 %).
- d. Kegiatan pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik dan fasilitasi kegiatan partai politik (43, 60 %).
- e. Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) → 99, 61 %
- f. Kegiatan fasilitasi program kerjasama Pemda dengan Ormas, LSM, dan LNL → 97, 68 %

3. Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat

Rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pam Tup lebaran, natal, dan tahun baru dan tamu VIP (97, 78 %).
- b. Kegiatan pemberdayaan badan koordinasi dan informasi (98, 33 %).
- c. Kegiatan keamanan terpadu (99, 99 %).

4. Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan sarasehan pembauran etnis (89, 38 %).
- b. Kegiatan forum komunikasi kesatuan bangsa (99 %).
- c. Kegiatan pembekalan wawasan kebangsaan (97, 65 %)

Berdasarkan capaian pengukuran kinerja kegiatan sebagaimana tertera pada uraian di atas, maka kemudian dilaksanakan analisis pencapaian kegiatan. Adapun

hasil analisis pencapaian kinerja kegiatan, diperoleh gambaran bahwa pencapaian secara umum mencapai 100 %. Hal ini bisa terjadi karena adanya efisiensi penggunaan dana pembangunan, sehingga penggunaan dana yang berupa masukan (input) adalah dibawah 100 % dan keluaran (output) mencapai 100%.

B. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Dari uraian pengukuran kinerja dan akuntabilitas kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik (output) 100 % / target terpenuhi.
2. Hambatan yang ada antara lain :
 - a. Pada awal anggaran untuk kegiatan pembekalan wasbang, ada permasalahan teknis administrasi keuangan dan hal ini bisa diatasi pada perubahan anggaran.
 - b. Alokasi dana kegiatan fasilitasi program kerjasama Pemda dengan Ormas, LSM, dan LNL alokasi dana terlatif terbatas.
3. Upaya mengatasi hambatan yang ada antara lain:
 - a. Koordinasi yang lebih baik dengan Dinas Teknis (DPPKAD) Purbalingga.
 - b. Mengubah jumlah Ormas sebagai mitra Pemda yang semula 25 organisasi diubah menjadi 13 organisasi.

C. Akuntabilitas Keuangan/Aspek Keuangan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbangpol pada tahun 2012 mendapatkan alokasi dana/ anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 1.031.241.000 (Satu Milyar Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), dengan realisasi Rp 1.054.748.371 (Satu Milyar Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), dan sisa kurang sebesar Rp 23.507.371 (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

Adapun rincian realisasi anggaran belanja langsung berdasarkan kinerja Kantor Kesbangpol kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2012 yang terdiri dari 4 program, 17 kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Penguatan Kelembagaan Daerah

Rincian kegiatan:

- a. Kegiatan penyediaan bahan dan jasa perkantoran

Alokasi dana sebesar Rp 121. 060. 000, realisasi dana sebesar Rp 112. 978. 409 (93,32 %). Sisa lebih sebesar Rp 8. 081. 591.

- b. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Alokasi dana sebesar Rp 73. 172. 000, realisasi dana sebesar Rp 71. 360. 800 (97, 52 %). Sisa lebih sebesar Rp 1. 811. 200.
 - c. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana
Alokasi dana sebesar Rp 94. 046. 000, realisasi dana sebesar Rp 90. 428. 400 (96, 15 %). Sisa lebih sebesar Rp 3. 671. 600.
 - d. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
Alokasi dana sebesar Rp 58. 698. 000, realisasi dana sebesar Rp 58. 383. 000 (99, 46 %). Sisa lebih sebesar Rp 315. 000
 - e. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai
Alokasi dana sebesar Rp 12. 600. 000, realisasi dana sebesar Rp 5. 910. 000 (46, 90 %). Sisa lebih sebesar Rp 6. 690. 000.
2. Program Fasilitasi dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik
- Rincian Kegiatan:
- a. Kegiatan forum komunikasi antar umat beragama (FKUB)
Alokasi dana sebesar Rp 49. 830. 000, realisasi dana sebesar Rp 49. 100. 012 (98, 54 %). Sisa lebih sebesar Rp 49. 830. 000.
 - b. Kegiatan fasilitasi kegiatan Ormas, LSM, dan pemantauan aspirasi masyarakat
Alokasi dana sebesar Rp 30. 000. 000, realisasi dana sebesar Rp 25. 310. 000 (84, 36 %). Sisa lebih sebesar Rp 4. 690. 000.
 - c. Kegiatan fasilitasi kegiatan Orpol dan penyusunan data serta peta partai politik.
Alokasi dana sebesar Rp 4. 998. 000, realisasi dana sebesar Rp 4. 997. 000 (99,98 %). Sisa lebih sebesar Rp 1. 000.
 - d. Kegiatan pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik dan fasilitasi kegiatan partai politik
Alokasi dana sebesar Rp 12. 703. 000, realisasi dana sebesar Rp 5. 538. 000 (43, 60%). Sisa lebih sebesar Rp 7.165.000
 - e. Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
Alokasi dana sebesar Rp 7. 500. 000, realisasi Rp 7. 471. 000 (99, 61 %). Sisa lebih sebesar Rp 29. 000.
 - f. Kegiatan Fasilitasi Program kerjasama Pemda dengan Ormas, LSM, lembaga Nirlaba lainnya.
Alokasi dan sebesar Rp 57. 094. 000, realisasi Rp 55. 768. 500 (97, 68%). Sisa lebih Rp 1. 325. 500.

3. Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat

Rincian kegiatan:

- a. Kegiatan Pam Tup lebaran, natal, dan tahun baru dan tamu VIP

Alokasi dana sebesar Rp 13. 902. 000, realisasi dana sebesar Rp 13. 872. 000 (99,78 %). Sisa lebih sebesar Rp 30. 000.

- b. Kegiatan pemberdayaan badan koordinasi dan informasi

Alokasi dana sebesar Rp 27. 000. 000, realisasi dana sebesar Rp 26. 550. 000 (99, 32 %). Sisa lebih sebesar Rp 450. 000.

- c. Kegiatan keamanan terpadu

Alokasi dana sebesar Rp 353. 000. 000, realisasi dana sebesar Rp 352. 997. 500 (99,99 %). Sisa lebih sebesar Rp 2.500.

4. Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Rincian kegiatan:

- a. Kegiatan sarasehan pembauran etnis

Alokasi dana sebesar Rp 4. 000. 000 %, realisasi dana sebesar Rp 3. 575. 000 (89, 38 %). Sisa lebih sebesar Rp 425. 000.

- b. Kegiatan forum komunikasi kesatuan bangsa

Alokasi dana sebesar Rp 14.745.000, realisasi dana sebesar Rp 14. 598. 000 (99 %). Sisa lebih sebesar Rp 147. 000.

Adapun pencapaian sasaran ini yaitu sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1. Terdukungnya kebutuhan Adm. Kantor	1 Paket	Rp 121. 060. 000	Rp 112. 978. 409	93, 32 %
2. Tercukupinya berbagai perjalanan dinas (dalam/ luar daerah)	1 Paket	Rp 73. 172. 000	Rp 71. 360. 000	97, 52 %
3. Terpeliharanya gedung dan peralatan kantor	1 Paket	Rp 94. 046. 000	Rp 90. 428. 000	96, 15 %

4. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana kantor	Jumlah komoditi/ barang yang dibeli 5 Komputer 1 Printer 2 Modem 2 Handycamp 1 Kamera 1 Jam Record 1 Kacamata Hyden Bolpoint Hyden Record 1 Benik Hydencamp	Rp 58. 698. 000	Rp 58. 383. 000	99, 46 %
5. Terwujudnya peningkatan SDM PNS	Peserta Diklat	Rp 12. 600. 000	Rp 5. 910. 000	46, 90 %
6. Terakomodasinya penyelesaian sengketa perizinan rumah ibadah dan terwujudnya program kerja FKUB	Jumlah peserta pembinaan (FKUB)	Rp 49. 830. 000	Rp 49. 100. 012	98, 54 %
7. Terdukungnya kegiatan Ormas, serta tercapainya aspirasi masyarakat	Jumlah peserta pembinaan	Rp 30. 000. 000	Rp 25. 310. 000	84, 36%
8. Terdukungnya kegiatan Parpol yang ada di Kab. Pbg	Jumlah pengurus Parpol yang dibina	Rp 30. 000. 000	Rp 25. 310. 000	84, 36 %
9. Terdukungnya kegiatan Parpol dan tercapainya tertib Adm. Keuangan Parpol	Jumlah Parpol yang difasilitasi	Rp 4. 998. 000	Rp 4. 997. 000	99, 98 %

10. Terwujudnya peningkatan kualitas keamanan	Jumlah Aparat Pam Tup	Rp 13.902.000	Rp 13.872.000	99,78 %
11. Teratasinya ATHG melalui upaya deteksi dini, cegah dini dengan memanfaatkan informasi yang akurat.	Jumlah anggota dan sekretariat kominda	Rp 27.000.000	Rp 26.550.000	98,33%
12. Teratasinya berbagai gangguan keamanan di Kab. Purbalingga melalui peningkatan koordinasi antar "muspida"	Jumlah instansi yang dibantu/difasilitasi	Rp 353.000.000	Rp 352.997.500	99,99 %
13. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan tentang hakekat ancaman dan gangguan, serta wawasan kebangsaan bagi peserta pembinaan/sarasehan FKDM	Jumlah peserta pembinaan (FKDM)	Rp 7.500.000	Rp 7.471.000	99,61 %
14. Terwujudnya peningkatan persatuan dan kesatuan antar Etnis di Purbalingga	Jumlah peserta sarasehan	Rp 4.000.000	Rp 3.575.000	89,38 %
15. Terwujudnya peningkatan persatuan dan kesatuan antar	Jumlah peserta forkom	Rp 14.745.000	Rp 14.598.000	99 %

Toga, Toma dan perangkat				
16. Terdukungnya Ormas, LSM, dan LNL, yang difasilitasi	Jumlah peserta pembekalan	Rp 75. 600. 000	Rp 73. 824. 500	97, 65 %
17. Terwujudnya peningkatan wawasan kebangsaan bagi peserta pembekalan	Jumlah Ormas/ LSM yang difasilitasi	Rp 57. 094. 000	Rp 55. 768. 500	97, 68%
Jumlah Total		Rp 1. 009. 948. 000	Rp 972. 662. 121	

**MATRIK TARGET DAN REALISASI
PROGRAM KEGIATAN KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2012**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
1	2	3	4	5	6	7	8
				Program Penguatan Kelambagaan Perangkat Daerah			
Terdukungnya kebutuhan ATK	1. Terlaksananya sistem akuntabilitas SKPD ➤ Prosentase pelaksanaan kegiatan SKPD tepat waktu ➤ Prosentase realisasi anggaran SKPD	100 % 100 %	100 % 100 %	a. Kegiatan penyediaan bahan dan jasa perkantoran	Rp 121.060.000	Rp 112.978.409	93,32 %
Tercukupinya berbagai perjalanan Dinas	2. Terlaksananya rapat koordinasi 5 paket	100 %	100 %	b. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Rp 73.172.000	Rp 56.437.395	97,52 %
Terdukungnya/terpeliharanya gedung dan peralatan	3. Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor 1 paket	100 %	100 %	c. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Rp 94.046.000	Rp 90.428.400	96,15%

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor	Terpeliharanya sarana yang dibutuhkan (Alat tulis dan Sandi) 5 Komputer 1 Printer 2 Modem 2 Handy camp 1 Kamera 1 Jam Handy Record Kamera Hyden Bolpoint Hyden Record Benik Hyden Camp	100 %	100 %	d. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Rp 58.698.000	Rp 58.383.000	99,46%
Terwujudnya peningkatan SDM PNS	4. Terlaksananya Diklat pegawai 10 orang	100 %	10 %	e. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai	Rp 12.600.000	Rp 5.910.000	46,90 %
				Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat			
Teratasinya ATHG melalui upaya deteksi dini, cegah dini dengan	Jumlah anggota sekretariat kominda 22 orang. Jumlah rapat 12 kali	100 %	100 %	a. Kegiatan pemberdayaan Badan Koordinasi dan Informasi	Rp 27.000.000	Rp 26.550.000	98,33 %

memanfaatkan informasi yang akurat							
Terwujudnya peningkatan kualitas keamanan	Jumlah personil Pam Tup 15 orang	100 %	100 %	b. Kegiatan Pam Tup Labaran, Natal, Tahun Baru dan tamu VIP	Rp 13.902.000	Rp 13.872.000	99,78 %
Teratasinya berbagai gangguan keamanan di Kabupaten Purbalingga melalui peningkatan koordinasi antara “muspida” plus	<p>Jumlah instansi yang terlibat pengamanan 6 orang/ institusi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Angka kriminalitas ➤ Jumlah kasus tindak kekerasan dalam masyarakat (RT) ➤ Jumlah kasus traffickicking ➤ Jumlah kasus konflik horizontal dalam kehidupan masyarakat yang ditangani ➤ Jumlah pos kamling desa 	<p>100 %</p> <p>Menurun</p> <p>Menurun</p> <p>Menurun</p> <p>Menurun</p> <p>9,92</p>	<p>100 %</p> <p>11 kejadian</p> <p>1 kejadian</p> <p>Nihil</p> <p>Nihil</p> <p>9,92 (100 %)</p>	c. Kegiatan keamanan terpadu	Rp 353.000.000	Rp 352.997.500	99,99 %

				Program Fasilitasi dan Pembinaan Sosial Politik			
Terakomodasinya penyelesaian sengketa pendirian rumah ibadah dan terwujudnya program kerja FKUB	Jumlah peserta pembinaan/ Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) = 350 orang	100 %	100 %	a. Kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)	Rp49.830.000	Rp 49.100.012	98,54%
Terdukungnya kegiatan Ormas, serta terserapnya aspirasi masyarakat	Jumlah peserta pembinaan 75 orang Jumlah LSM/ kelompok swadaya masyarakat yang terdaftar: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah LSM • Jumlah Ormas • Jumlah OKP 	100 %	100 %	b. Kegiatan fasilitasi kegiatan Ormas, LSM, dan pemantauan aspirasi masyarakat	Rp 30.000.000	Rp 25.310.000	84,36 %
		19 LSM 31Ormas 12 OKP	27 LSM 55 Ormas 13 OKP				

Terdukungnya Ormas, LSM, dan LNL, yang difasilitasi	Jumlah Ormas, LSM, LNL, yang difasilitasi	13 orang	13 orang	c. Kegiatan fasilitasi program kerjasama Pemda dengan Ormas, LSM, dan Lembaga Nirlaba lainnya.	Rp 57.094.000	Rp 55.768.000	97,68%
Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan tentang ancaman dan gangguan serta wawasan kebangsaan bagi peserta pembinaan	Jumlah peserta sarasehan FKDM 50 orang	100 % 50 orang	100 % 50 orang	d. Kegiatan forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Rp 7.500.000	Rp 7.471.000	99,61%
Terdukungnya kegiatan Parpol yang ada di Purbalingga	Jumlah pengawas parpol yang terbina 75 orang	100 %	100 %	e. Kegiatan fasilitasi, kegiatan Orpol, dan penyusunan data serta peta partai politik	Rp 4.998.000	Rp 4.997.000	99,98 %
Terdukungnya kegiatan Parpol dan tercapainya	Jumlah Parpol yang difasilitasi (9 Parpol)	100 %	100 %	f. Kegiatan pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik	Rp 12.703.000	Rp 5.538.000	43,60 %

tertib administrasi kekayaan Parpol	Tingkat partisipasi masyarakat			dan fasilitasi partai politik				
		• Pemilu legislatif	Nihil		Nihil			
		• Pemilu Presiden	Nihil		Nihil			
		• Pemilu Gubernur	Nihil		Nihil			
	• Jumlah Pos Kamling Desa/ kel aktif	9,92	9,92					

				Program Pembinaan			
Terwujudnya peningkatan persatuan dan kesatuan etnis	Jumlah peserta sarasehan/ pembinaan pembauran etnis 75 orang	100 % 75 orang	100 %	Wawasan Kebangsaan a. Kegiatan sarasehan pembauran etnis	Rp 4.000.000	Rp 3.575.000	89,38 %
Terwujudnya peningkatan persatuan dan kesatuan antar Toga, Toma, dan perangkat	Jumlah peserta pembinaan pada acara Forkom Kesbang 210 orang	100 % 210 orang	100 %	b. Kegiatan Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa	Rp 14.745.000	Rp 14.598.000	99 %

Terwujudnya peningkatan wawasan kebangsaan bagi peserta pembinaan	Jumlah peserta pembinaan pada acara pembekalan wawasan kebangsaan	100 % 900 orang	100 % 900 orang	c. Kegiatan pembekalan wawasan kebangsaan	Rp 75.600.000	Rp 73.824.500	97, 65%
---	---	-----------------------	-----------------------	---	---------------	---------------	---------

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Kantor Kesbang Pol Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2012, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum/ singkat dapat disimpulkan bahwa baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung dapat dilaksanakan dengan baik dan relatif tidak ada kendala yang berat, dan output mencapai 100 %.

Adapun rincian alokasi dana sebagai berikut:

1. Belanja tidak langsung
Alokasi dana sebesar Rp 957.991.000, realisasi dana sebesar Rp 943.214.391 (98,46%). Sisa sebesar Rp 14.776.609.
2. Belanja langsung
Alokasi dana sebesar Rp 1.009.948.000 , realisasi dana sebesar Rp 972.662.121. Sisa lebih sebesar Rp 37.285.879.

B. Permasalahan yang dihadapi

Kantor Kesbang Pol secara umum terdapat permasalahan yang cukup menonjol antara lain:

1. Sarana Mobilitas sangat terbatas: kendaraan roda empat = 1 (satu) buah, idealnya 2 (dua) buah.
2. PNS/ Pegawai saat ini berjumlah 20 (dua puluh) orang, kondisi/ jumlah tersebut sangat kurang, idealnya 25 (dua puluh lima) orang, kurang 5 (lima) orang yaitu JFU :
 - a. Arsiparis (di Sub Bag TU).
 - b. Operator Komputer yang mahir (di Sub Bag TU).
 - c. Petugas Lapangan (Pencari Data/ Informasi Sie Kesbang merangkap staf Administrasi.
 - d. Petugas/ Pelayan Ijin Riset, Karya Tulis di Seksi Bina Kesbang.
 - e. Pengumpul dan pengolah data merangkap operator di Seksi Bina Sospol.
3. SDM PNS/Pegawai terbatas, sehingga kinerja belum optimal.
4. Alokasi dana sangat terbatas.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Beberapa solusi yang diterapkan dalam mengatasi masalah, antara lain:

1. Memaksimalkan PNS/ pegawai yang ada, bila perlu kerja lembur untuk mengatasi beban kerja yang cukup berat.
2. Memaksimalkan sarana/ prasarana yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas.
3. Efisiensi dana, menimbang dana yang ada relatif terbatas.
4. Mengirimkan diklat PNS untuk meningkatkan kemampuan PNS

Purbalingga, Januari 2013

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. NUR HAMAM, M. Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19620614 198503 1 009

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA**



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. NUR HAMAM, M. Si
Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. HERU SUDJATMOKO, M. Si
Jabatan : Bupati Purbalingga
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, Juli 2012

Pihak Kedua,
BUPATI PURBALINGGA

Pihak Pertama,
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. HERU SUDJATMOKO, M. Si

Drs. NUR HAMAM, M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19620614 198503 1 009

